

**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA JUMPUTREJO
KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO**

Iffara Ken Devardhini

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
farraken123@gmail.com;

Dida Rahmadanik

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
didarahma@untag-sby.ac.id;

M. Kendry Widiyanto

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
kenronggo@untag-sby.ac.id;

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tanggung jawab bersamaan dengan Kepala Desa untuk merancang dan mengesahkan aturan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Desa. Aspirasi masyarakat dapat diartikan sebagai pandangan atau pendapat masyarakat yang mencakup pemikiran, dugaan, pilihan, dan harapan. Dengan adanya aspirasi masyarakat, dapat diperhatikan tingkat keterbukaan dan sejauh mana tingkat keterbukaan tersebut tercermin dalam kualitas aspirasi masyarakat. Kinerja merupakan suatu keadaan penting yang patut terlihat dan disampaikan kepada pihak terkait untuk menilai sejauh mana keberhasilan lembaga terkait dengan visi organisasi dan untuk memahami konsekuensi baik dan buruk dari kebijakan operasional tertentu. Dalam penelitian ini menilai bagaimana kinerja BPD Jumputrejo dalam penyaluran aspirasi masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kinerja BPD Jumputrejo dalam penyaluran aspirasi masyarakat telah cukup baik dan telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditentukan.

Kata Kunci: *BPD, Kinerja, Aspirasi*

A. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, didefinisikan desa ialah suatu kesatuan hukum dalam masyarakat yang memiliki batas daerah dan memiliki kewenangan mengelola dan menjalankan tugas administratif pemerintahan, dengan mempertimbangkan inisiatif

masyarakat, hak asal usul, atau tradisi yang diakui dan dihormati dalam tatanan pemerintahan Republik Indonesia (Indrawati, Weni; Suntoro, Irawan; Nurmalisa, 2017). Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD memiliki fungsi ganda selaku lembaga legislatif di tingkat Desa dan sebagai wakil dari masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini diberikan hak sepenuhnya untuk melaksanakan prinsip demokrasi di tingkat desa, baik dalam mengawasi Pemerintah Desa serta dalam menampung aspirasi dari warga desa (Pahlawan, 2019). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tanggung jawab bersamaan dengan Kepala Desa untuk merancang dan mengesahkan aturan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Desa. Dalam konteks ini, peran BPD melibatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa yang diselenggarakan oleh Kepala Desa selaku pemimpin desa.

Aspirasi masyarakat dapat diartikan sebagai pandangan atau pendapat masyarakat yang mencakup pemikiran, dugaan, pilihan, dan harapan. Sementara itu, istilah "masyarakat" merujuk pada kepemilikan atau kesamaan di antara orang banyak. Dengan demikian, hubungan antara kedua konsep tersebut melibatkan keinginan yang dilakukan oleh sejumlah orang. Dengan adanya aspirasi masyarakat, dapat diperhatikan siapa yang memperlihatkan tingkat keterbukaan dan sejauh mana tingkat keterbukaan tersebut tercermin dalam kualitas aspirasi masyarakat. Aspirasi tersebut mencerminkan kualitas dan memiliki signifikansi untuk melakukan perbaikan dan mendukung kemajuan organisasi secara keseluruhan (Sonni et al., 2021). Proses penyaluran aspirasi ini memerlukan dukungan aktif dari masyarakat desa, terutama melalui kontribusi masukan dan laporan yang bertujuan untuk memajukan pelaksanaan tugas pemerintah dan proses pembangunan di tingkat desa. Keberhasilan untuk secara konsisten memahami realitas kehidupan masyarakat yang diwakilinya sejalan dengan usaha untuk meningkatkan kualitas aspirasi yang diterima dari masyarakat. Setiap anggota BPD perlu menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk dalam menyerap, menampung, dan menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. (Martain, 2020)

Ide dasar dari konsep kinerja sebagian besar dapat dilihat melalui dua aspek, yaitu kinerja pegawai dan kinerja organisasi. Keterkaitan antara kinerja pegawai dan kinerja organisasi sangatlah terkait. Keberhasilan mencapai target organisasi tidak mampu dipisahkan dari potensi yang menjadi bagian dari organisasi, diperankan oleh pegawai yang secara aktif berkontribusi sebagai bagian integral dalam usaha meraih target tersebut (Djabar, 2018). Kinerja merupakan suatu keadaan penting yang patut terlihat dan disampaikan kepada pihak terkait untuk menilai sejauh mana keberhasilan lembaga terkait dengan visi organisasi dan untuk memahami konsekuensi baik dan buruk dari kebijakan operasional tertentu. Kinerja aparat pemerintah memiliki signifikansi besar, karena aparat pemerintah berperan sebagai pemain utama yang berdampak signifikan terhadap kepentingan masyarakat. Dampak baik atau buruknya kinerja aparat pemerintah akan dirasakan oleh masyarakat, sehingga kinerja aparat pemerintah diharapkan maksimal.

Menurut pengamatan awal, permasalahan yang terjadi saat ini pada Badan Permusyawaratan Desa Jumputrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan perannya dinilai belum optimal karena kurang maksimal dalam merespon terkait keluhan masyarakat. Hal ini dapat dilihat melalui berita media online yang diterbitkan oleh kabarsidoarjo.com pada tanggal 22 Maret tahun 2015 memiliki judul “Sampah dan Sertifikat Massal Jadi Masukan Warga”. Sumber: <https://kabarsidoarjo.com/2015/03/22/sampah-dan-sertifikat-jadi-masukan-warga/>. Dalam berita media online tersebut dijelaskan, warga menyampaikan keluhan saat pelaksanaan Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) bahwa masyarakat merasa resah akibat menumpuknya sampah-sampah yang berada dialiran sungai Desa Jumputrejo Kecamatan Sukodono. Meskipun telah memiliki jadwal pengerukan sampah, warga menganggap jadwal pengerukan yang telah diagendakan ini berjarak terlalu lama. Dengan bertambahnya volume sampah setiap harinya, hal ini tentunya membuat para warga merasa terganggu terhadap aroma tidak sedap yang timbul dari sampah-sampah tersebut.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Administrasi Publik

Menurut Dimock dan Dimock (1992: 19) dalam (Anggara, 2016), administrasi negara merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan lebih luas, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari satu keluarga hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa disusun, digerakkan, dan dikemudikan. Administrasi negara juga merupakan bagian ilmu politik yang mempelajari penentuan kebijaksanaan negara dalam suatu proses. Oleh sebab itu, sebagai suatu ilmu yang diperoleh dari kedua ilmu pengetahuan ini, administrasi negara menghendaki dua macam syarat jika hendak dipahami. Pertama, perlu mengetahui sesuatu mengenai administrasi umum. Kedua, harus diakui bahwa banyak masalah administrasi negara timbul dalam kerangka politik.

Kinerja

Agus Dwiyanto (2002:48) dalam (Wuri et al., 2017) mengemukakan ukuran dari tingkat kinerja suatu organisasi publik secara lengkap sebagai berikut:

1. Produktivitas

Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antar input dan output. Konsep produktivitas ini kemudian dirasa terlalu sempit dan General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan suatu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang didapatkan yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

2. Kualitas Layanan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan

demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik.

3. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

4. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kinerja organisasi publik tidak hanya dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah seperti pencapaian target, tetapi juga harus dinilai dari ukuran eksternal seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Aspirasi Masyarakat

Aspirasi masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat baik berupa keterlibatan langsung maupun berupa sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat manapun sehingga mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan. Abe yang dikutip Salman (2009:22) dalam (Hermanto, 2020), beranggapan dengan melibatkan masyarakat maka secara langsung akan membawa tiga dampak penting yaitu:

- a. Terhindar dari peluang terjadinya manipulasi. Karena dengan terlibatnya masyarakat maka akan memperjelas apa yang sebetulnya terjadi di masyarakat.
- b. Memberikan nilai tambah dalam hal legitimasi rumusan perencanaan. Karena semakin banyak masyarakat yang terlibat, maka akan semakin baik.
- c. Dan juga dapat meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1992:21) dalam (Nugrahani, 2014), Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa informasi dari ucapan, tulisan, dan perilaku individu yang menjadi objek pengamatan. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk

mengungkapkan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya. Fokus utama dari penelitian kualitatif adalah memahami kondisi suatu konteks dengan mendeskripsikan secara rinci dan mendalam kondisi dalam suatu konteks alami (*natural setting*). Penelitian ini berusaha untuk mencermati apa yang benar-benar terjadi di lapangan studi tanpa adanya pengaruh atau manipulasi.

Adapun lima indikator dalam penelitian ini yang akan digunakan untuk mengukur Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyaluran Aspirasi Masyarakat Desa Jumputrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto:

1. Produktivitas
2. Kualitas Layanan
3. Responsivitas
4. Responsibilitas
5. Akuntabilitas

Lokasi penelitian ini berada di Balai Desa Jumputrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Data yang didapatkan oleh peneliti telah sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung melalui sumber pokok meliputi wawancara dan hasil pengamatan observasi dari suatu tempat ataupun kejadian. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen-dokumen grafis (data, catatan, tabel dan lain-lain) dan dokumentasi yang dapat memperkuat data primer.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dan informasi yang didapat, maka dapat diketahui Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyaluran Aspirasi Masyarakat Desa Jumputrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo yang menggunakan teori indikator Agus Dwiyanto (2002:48) dalam dalam (Wuri et al., 2017) yang terdiri dari lima indikator.

1. Produktivitas

Melalui hasil penyajian data pada indikator Produktivitas, Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jumputrejo terbilang sudah baik. Hal ini dapat dibuktikan dalam hasil wawancara kepada masyarakat yang mengatakan bahwa BPD Jumputrejo telah menjalankan fungsinya dengan baik. Dihubungkan dengan teori menurut Agus Dwiyanto (2002:48) dalam (Wuri et al., 2017) Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antar input dan output. Dari segi Produktivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jumputrejo dalam penyaluran aspirasi masyarakat sudah baik. BPD Jumputrejo memiliki target-target yang ingin dicapai setiap tahun seperti target pembangunan desa, keamanan, perlindungan, kesejahteraan dan lain-lain. Dilihat dari segi input masyarakat yang menyalurkan aspirasinya kepada BPD Jumputrejo dan segi output BPD Jumputrejo yang memusyawarahkan solusi yang terbaik untuk hasil memuaskan yang diharapkan oleh masyarakat.

2. Kualitas Layanan

Melalui hasil penyajian data pada indikator Kualitas Layanan, Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jumputrejo terbilang kurang baik. Hal ini dapat dibuktikan dalam hasil wawancara kepada masyarakat yang mengatakan bahwa pelayanan kurang efisien karena tidak adanya forum atau wadah resmi untuk penyaluran aspirasi kepada BPD. Dihubungkan dengan teori menurut Agus Dwiyanto (2002:48) dalam (Wuri et al., 2017) Kualitas Layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Dari segi Kualitas Layanan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jumputrejo dalam penyaluran aspirasi masyarakat masih dianggap kurang baik. Dilihat dari fasilitas untuk penyampaian aspirasi, BPD Jumputrejo belum menyediakan forum resmi untuk masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. BPD Jumputrejo masih menggunakan metode penyampaian dari mulut ke mulut pada saat kegiatan MUSREMBANG (Musyawarah Rembukan Pembangunan) yang dilakukan tiga bulan sekali atau metode kirim pesan melalui aplikasi *WhatsApp* yang dimana hal ini dapat menyebabkan proses penyaluran aspirasi masyarakat bercampur dengan urusan pribadi individu.

3. Responsivitas

Melalui hasil penyajian data pada indikator Responsivitas, Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jumputrejo terbilang sudah baik. Hal ini dapat dibuktikan dalam hasil wawancara kepada masyarakat yang mengatakan bahwa BPD Jumputrejo cukup cekatan dalam menanggapi masyarakat yang menyalurkan aspirasi. Dihubungkan dengan teori menurut Agus Dwiyanto (2002:48) dalam (Wuri et al., 2017) Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dari segi Responsivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jumputrejo dalam penyaluran aspirasi masyarakat sudah baik. Dilihat dari BPD Jumputrejo yang memiliki program keliling desa untuk berkoordinasi dan memantau apabila ada permasalahan. Hasil wawancara kepada masyarakat juga menunjukkan hasil yang baik karena sikap BPD Jumputrejo responsif dalam menanggapi aspirasi masyarakat.

4. Responsibilitas

Melalui hasil penyajian data pada indikator Responsibilitas, Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jumputrejo terbilang cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dalam hasil wawancara kepada masyarakat, 2 dari 3 masyarakat mengatakan bahwa dalam menangani permasalahan BPD Jumputrejo telah tepat waktu. Dihubungkan dengan teori menurut Agus Dwiyanto (2002:48) dalam (Wuri et al., 2017) Responsibilitas dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi. Dari segi Responsibilitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jumputrejo dalam penyaluran aspirasi masyarakat cukup baik. Dilihat dari hasil wawancara kepada BPD Jumputrejo tentunya memiliki SOP yang telah ditetapkan dan tenggat waktu dalam menyelesaikan permasalahan yang

dimana dianggap sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Hal ini didukung dengan hasil wawancara terhadap masyarakat, BPD Jumputrejo yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan dengan tepat waktu dan memberikan hasil yang diharapkan oleh masyarakat.

5. Akuntabilitas

Melalui hasil penyajian data pada indikator Akuntabilitas, Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jumputrejo terbilang sudah baik. Hal ini dapat dibuktikan dalam hasil wawancara kepada masyarakat yang mengatakan bahwa masyarakat merasa puas terhadap sikap dan pelayanan BPD Jumputrejo dalam menangani permasalahan. Dihubungkan dengan teori menurut Agus Dwiyanto (2002:48) dalam (Wuri et al., 2017) suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas tinggi apabila kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Dari segi Akuntabilitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jumputrejo dalam penyaluran aspirasi masyarakat sudah baik. Dilihat dari BPD Jumputrejo yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang baik. Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara terhadap masyarakat yang puas terhadap pelayanan BPD Jumputrejo. Jadi dapat diuraikan bahwa Akuntabilitas BPD Jumputrejo ini sudah sangat baik.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyaluran Aspirasi Masyarakat Desa Jumputrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo melalui hasil dokumentasi dan hasil wawancara sudah cukup baik, hal ini terdapat 4 dari 5 indikator yang dinilai sudah baik yaitu pada indikator Produktivitas, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas. Pada indikator Produktivitas, disebutkan bahwa BPD Jumputrejo telah memiliki target setiap tahunnya seperti pembangunan, keamanan, perlindungan, kesejahteraan dan lain-lain. Pada indikator Responsivitas, disebutkan bahwa BPD Jumputrejo yang memiliki jadwal kegiatan pengecekan lingkungan rutin yang berguna untuk berkoordinasi atau berinteraksi kepada masyarakat terkait penyaluran aspirasi. Pada indikator Responsibilitas, disebutkan bahwa BPD Jumputrejo dalam melakukan kegiatan penyaluran aspirasi telah berjalan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Pada indikator Akuntabilitas, disebutkan bahwa BPD Jumputrejo telah melakukan kegiatan sesuai dengan kebijakan organisasi. Masing-masing anggota BPD tentunya sudah mengetahui jabatan dan mengetahui tugas dan wewenang yang telah diberikan. Terdapat 1 dari 5 indikator yang dinilai kurang baik yaitu pada indikator Kualitas Layanan, disebutkan bahwa BPD Jumputrejo sampai saat ini masih belum menyediakan forum resmi yang berguna sebagai media untuk penyaluran aspirasi. Kegiatan penyaluran masih menggunakan aplikasi *WhatsApp* dan MUSREMBANG (Musyawarah Rembukan Pembangunan) yang dilakukan tiga bulan sekali.

Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti, sebaiknya BPD Jumputrejo membuat atau menciptakan forum seperti website resmi untuk masyarakat sebagai media penyaluran aspirasi. BPD Jumputrejo dapat memperkenalkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat dengan menyampaikan manfaat dan tujuan dari website tersebut. BPD Jumputrejo juga harus mempunyai admin yang kompeten dan responsif dalam mengelola website agar dapat memastikan keaktifan dan kelancaran operasionalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2016). Ilmu Administrasi Negara. In *Cv Pustaka Setia*.
- Djabar, K. M. A. B. D. (2018). Fungsi Legislasi Di Kecamatan Talatoko Kabupaten Tojo Una-Una. *E Jurnal Katalogis*, 6(3), 77–87.
- Hermanto, D. (2020). *INOVASI PEMERINTAH DAERAH MELALUI PROGRAM “SEMALAM DI DESA” DALAM PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DI DESA RANTANG TALLANG KABUPATEN LUWU UATARA*. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR.
- Indrawati, Weni; Suntoro, Irawan; Nurmalisa, Y. (2017). Efektivitas Kinerja Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Di Desa Tanggulangin. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Martain, Z. (2020). *Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sebulu Kartanegara the Role of the Village Consultancy Agency (Bpd) in Distributing Community Aspirations in Sebulu Ulu Village , Sebulu District , Kutai Kartanegara Regency*. 9(1).
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. <http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>
- Pahlawan, R. H. (2019). Kinerja badan permusyawaratan desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. *Jurnal Civic Hukum*, 4(November), 147–154.
- Sonni, A. F., Riandani, R., Unde, A. A., & Gafar, A. (2021). Aktivitas Humas Dprd Kota Palu Sebagai Mediator Aspirasi Masyarakat. *Kinesik*, 8(2), 146–157. <https://doi.org/10.22487/ejk.v8i2.157>
- Wuri, R. R., Kaunang, M., & Pioh, N. R. (2017). KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK (Studi di Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 107–115.